



KEKUASAAN SEMANTIK
DALAM ANALISIS WACANA KRITIS DEBAT CAPRES-CAWAPRES
Semantic Power in Critical Discourse Analysis of the Capres-Cawapres Debate

Wati Kurniawati¹, Ririen Ekoyanantiasih², Santy Yulianti³, Menek Hardaniawati⁴,
S.S.T. Wisnu Sasangka⁵, dan Winci Firdaus⁶

¹³⁴⁵⁶Badan Riset dan Inovasi Nasional

²Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

[waticurniawati62@yahoo.com](mailto:watikurniawati62@yahoo.com), ririen_suladi@yahoo.co.id, itnaz_ysl@yahoo.com,
menekhardaniawati@yahoo.co.id, linguaginurit@yahoo.ci.id, wincifirdausoke@gmail.com

Naskah Diterima Tanggal 7 September 2021—Direvisi Akhir Tanggal 15 Mei 2022—Dipublikasikan Tanggal 18 Juni 2022
doi: <https://doi.org/10.26499/rmh.v11i1.4966>

Abstrak

Penggunaan bahasa yang berkaitan dengan ideologi yang dibawa oleh partai dalam pidato politiknya sangat penting untuk dikaji, terutama dalam kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana penggunaan bahasa para politikus berdasarkan kekuasaan semantik. Tujuan penelitian ini ialah mengidentifikasi bahasa para politikus yang ditinjau dari kekuasaan semantik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan kualitatif. Data diambil dari transkrip pidato politik Jokowi-Amin dan Prabowo-Sandiaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teks pidato yang diproduksi oleh tokoh-tokoh partai politik telah memanfaatkan fitur-fitur linguistik, seperti struktur teks, kosakata, gaya bahasa atau majas, kalimat, kohesi, koherensi, ketransitifan, dan kata ganti. Secara tekstual, wacana dalam pidato politik tersebut menunjukkan fitur-fitur semantik yang digunakan untuk melancarkan suatu proses sosial: pembentukan citra positif suatu partai dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Proses dan praktis sosial yang disalurkan oleh tokoh-tokoh partai politik tersebut berkaitan erat dengan latar belakang sosial, politik, dan budaya mereka. Wacana verbal dalam pidato Jokowi--Amin, Prabowo--Sandiaga diekspresikan dalam bentuk rangkaian kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Kalimat-kalimat yang diungkapkan adalah kalimat yang berbentuk kalimat ajakan, kalimat seruan, kalimat harapan, kalimat janji, dan kalimat pernyataan. Wacana pidato yang diungkapkan oleh para orator tersebut juga mengandung pemakaian gaya bahasa, yaitu gaya bahasa hiperbola, metafora, personifikasi, dan repetisi.

Kata-kata kunci: *politikus, semantik, partai politik.*

Abstract

The use of language in relation to the ideology brought by the party in its political speech is important to study in relation to the life of the nation and state. The formulation of the problem in this research is how to use the language of politicians based on semantic power. The purpose of this study is to identify the language of politicians in terms of semantic power. This research uses descriptive and qualitative research methods. The data is taken from transcripts of Jokowi-Amin and Prabowo-Sandiaga political speeches. The results showed that speech texts produced by political party figures had utilized linguistic features, such as text structure, vocabulary, language style or figure of speech, sentences, cohesion, coherence, transitivity, and pronouns. Textually, discourse and social show semantic features that are used to launch a social process: the formation of a positive image of a party in fighting for the interests of the people. The social processes and practices channeled by the political party figures are closely related to their social background, politics, and cultural values in particular and Indonesia in general. Verbal discourse in Jokowi-Amin, Prabowo-Sandiaga speeches was expressed in the form of a series of

transitive active sentences and intransitive active sentences. Sentences that are expressed are sentences in the form of invitation sentences, exclamatory sentences, sentences of hope, sentences of promises, and sentences of statements. The speech discourses expressed by the orators also contain the use of language styles, namely hyperbole, metaphor, personification, and repetition.

Keywords: *politicians, semantic, political parties*

How to Cite: Kurniawati, Wati, dkk. (2022). Kekuasaan Semantik dalam Analisis Wacana Kritis Debat Capres-Cawapres. *Ranah: Jurnal Kajian Bahasa*. 11(1). 165—179. doi: <https://doi.org/10.26499/rnh.v11i1.4966>

PENDAHULUAN

Dinamika demokrasi lokal di Indonesia mulai tumbuh ketika ada pemilihan caleg, pilkada, dan pilpres. Pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pemilu serentak 2019 merupakan proses pemilihan yang menjadi pusat perhatian masyarakat di Indonesia. Proses pemilu presiden ini merupakan sarana demokrasi yang tidak terlepas dari adanya kampanye. Salah satu bentuk kampanye ialah debat presiden dan wakil presiden. Debat adalah pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing (Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2017, pp. 358--359). Debat presiden dan wakil presiden merupakan penyampaian visi dan misi serta program kepada masyarakat melalui bahasa. Debat merupakan bentuk satu kesatuan utuh atau suatu wacana lisan.

Dalam debat politik tampak tergambar sikap seorang tokoh partai politik dalam mengemban tugas dan menjalankan fungsi dari partainya. Sikap tersebut tampak dari penggunaan bahasa dalam debat politiknya. Selain itu, sikap tersebut juga berpengaruh dalam menjalankan fungsi partainya. Secara dominan, keberadaan partai politik dalam menjalankan fungsinya dibentuk melalui penggunaan bahasa yang tampak dalam teks orasi-orasinya. Dari penggunaan bahasa tersebut dapat dilihat unsur-unsur ideologi yang dibawa. Jika ideologi didefinisikan sebagai konstruksi atas realitas yang dibangun melalui berbagai bentuk praktik politik, bahasa akan menjadi diskursif (disimpulkan secara logis/berkaitan dengan nalar).

Sementara itu, penelitian Damayanti (2015) bertujuan untuk mengetahui gaya komunikasi Jokowi pada debat capres Pilpres 2014 yang diselenggarakan oleh KPU dengan metode pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivisme. Dalam penelitian itu dinyatakan bahwa gaya komunikasi Jokowi pada debat capres Pilpres 2014 menonjolkan karakteristik pribadi Jokowi, yaitu santai, berbicara dengan volume suara yang tidak lantang, dan menjawab pada aspek-aspek yang sejalan dengan programnya.

Adili (2015) mendeskripsikan dimensi teks model van Dijk pada wacana teks berita kritik pemerintahan Jokowi dengan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi teks van Dijk terdiri atas tiga bagian, yakni (1) dimensi struktur makro, yaitu penulis teks berita senantiasa mengedepankan topik atau tema dalam setiap teks berita; (2) dimensi super struktur, yaitu skema bagian dan urutan teks berita disajikan oleh penulis secara utuh; dan (3) dimensi struktur mikro, yaitu beberapa unsur digunakan oleh penulis teks berita, seperti latar, detail, maksud, praanggapan, nominalisasi, bentuk kalimat, koherensi, kata ganti, leksikon, grafis, dan metafora (majas).

Hasil penelitian Kusno & Nur B. (2017) menunjukkan bahwa struktur teks pendek dan langsung menyampaikan isi tuturan. Secara substansi teks mengungkapkan beragam persepsi Fahri Hamzah (FH), seperti masyarakat disuguhi drama tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), KPK selalu dianggap benar, dan media berlaku tidak objektif. Aspek ketransitifan menunjukkan FH menguatkan hal-hal negatif dan meniadakan hal positif. Terdapat penekanan tentang kebobrokan KPK. Fungsi modalitas berupa tuturan yang

menguatkan perlunya Pansus Angket KPK. Penggunaan kosakata secara keseluruhan menggambarkan pandangan negatif dan pesimisme terkait kinerja KPK. Penggunaan gaya bahasa sinisme, sarkasme, dan satire mewarnai keseluruhan cuitan FH. Analisis berdasarkan dimensi praktik wacana (level menengah) menunjukkan bahwa pandangan FH berseberangan dengan opini publik. Pansus KPK dianggap sebagai upaya melindungi anggota DPR yang terlibat kasus e-KTP. Adapun analisis berdasarkan dimensi praktik sosial budaya (level makro) menunjukkan bahwa FH termasuk politisi yang sering mengkritik kinerja KPK, termasuk penanganan kasus e-KTP.

Hasil penelitian yang telah dilakukan ketiga peneliti tersebut ialah (i) gaya komunikasi Jokowi pada debat capres Pilpres 2014 dilakukan dengan santai, tidak lantang, dan jawaban sesuai dengan programnya; (ii) wacana teks berita kritik pemerintahan Jokowi ditinjau berdasarkan dimensi struktur makro, super struktur, dan mikro, dan (iii) persepsi Fahri Hamzah melalui cuitan di Twitter pada tanggal 2—26 Juli 2017. Oleh karena itu, penelitian tentang penggunaan bahasa dalam debat politik sangat menarik dan penting untuk diteliti. Penggunaan bahasa orator berkaitan erat dengan ideologi suatu partai. Dengan demikian, penggunaan bahasa dalam kaitannya dengan ideologi yang dibawa oleh partai dalam debat politik penting untuk diteliti karena berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana penggunaan bahasa para politikus berdasarkan kekuasaan semantik. Tujuan penelitian ini ialah mengidentifikasi bahasa politikus ditinjau dari kekuasaan semantik.

LANDASAN TEORI

Kata *kekuasaan* adalah kemampuan orang atau golongan untuk menguasai orang atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, wewenang, karisma, atau kekuatan fisik (Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2017, p. 893). Dalam konteks *kekuasaan* ada pihak penguasa dan yang dikuasai. Sementara itu, kata *semantik* adalah (1) bagian dari struktur bahasa yang berhubungan dengan makna ungkapan dan struktur makna suatu wicara; (2) sistem dan penyelidikan makna dan arti dalam suatu bahasa atau bahasa pada umumnya (Kridalaksana, 2001).

Teori struktur wacana dalam penelitian ini mengacu pendapat Van Dijk (1999) dalam Eriyanto (2001), yaitu struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro. Struktur mikro meliputi semantik, sintaksis (bentuk kalimat aktif dan pasif, koherensi, dan kohesi), dan retorika. Sementara itu, Van Dijk (1999) menyatakan bahwa ketika mengadopsi analisis tekstual, wacana teks orasi harus dianalisis dari berbagai tingkatan yang dapat dikaitkan dengan sikap seseorang dan partainya, kemudian model analisis wacana yang digunakan ini disebut sebagai kognisi sosial. Penelitian atas wacana tidak cukup hanya didasarkan pada analisis tekstual, tetapi juga hubungan struktur teks dan percakapan dengan konteks kognitif, sosial, kultural, atau historis (Van Dijk, 1999). Objek kajian dapat terdiri atas pemroduksian teks, pemahaman teks, interaksi antarpengguna bahasa, fungsi sosial, dan kultural wacana. Karena teks hanya merupakan hasil suatu praktik produksi, analisis wacana harus melalui penganalisisan proses produksi teks. Dengan demikian, diperoleh pengetahuan tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya teks.

Van Dijk (1999) memahami penerapan unsur-unsur kebahasaan dalam teks pidato ini sebagai bagian dari strategi berkomunikasi yang berkaitan erat dengan politik. Pemilihan kata, penyusunan kata, dan pemakaian gaya bahasa tertentu harus dipandang sebagai politik berkomunikasi.

Praktik diskursif yang berkaitan dengan pengetahuan dan kecerdasan menekankan pada (a) bagaimana penulis teks menggambarkan wacana dan genrenya dalam memproduksi teks; (b) bagaimana pembaca teks juga menginterpretasikan teks wacana orasi.

Fairclough (2003) mendefinisikan analisis wacana kritis sebagai suatu analisis hubungan antara pemakaian bahasa dan struktur sosial serta antara pemakaian bahasa dan budaya dalam masyarakat. Selanjutnya, dikatakan bahwa ada tiga dimensi dalam setiap praktek diskursif, yaitu (1) teks, (2) diskursif praktis yang meliputi produksi, dan (3) interpretasi dari suatu teks dan praktek sosial. Analisis wacana kritis (AWK) digunakan sebagai wacana analisis yang bertujuan secara sistematis untuk mengeksplorasi hubungan kausalitas antara (a) praktik-praktik diskursif, kejadian, dan teks serta (b) struktur sosial dan budaya yang lebih luas.

Selain pemakaian AWK, penggunaan analisis tekstual juga sangat penting. Analisis tekstual dilakukan dengan memperhatikan unsur-unsur kebahasaan yang diterapkan ke dalam wacana atau orasi teks pidato. Unsur-unsur kebahasaan yang dapat dipakai untuk menganalisis teks pidato, misalnya, ialah kosakata, pilihan kata dan kohesi, fonologi, morfologi, dan semantik. Dari segi semantik, misalnya, dapat diketahui maksud atau makna kata yang ingin ditekankan atau ditonjolkan di dalam teks pidato yang disampaikan oleh partai politik.

Pilihan kosakata yang tepat di dalam narasi orator harus merupakan satu kesatuan yang utuh dalam wacana. Oleh karena itu, unsur kohesi dan koherensi harus diperhatikan. Kohesi merupakan keserasian hubungan antara unsur yang satu dan unsur yang lain dalam wacana sehingga terciptalah pengertian yang apik. Kohesi merujuk pada pertautan bentuk, sedangkan koherensi merujuk kepada pertautan makna (Almanar, 2000).

Sementara itu, Fairclough (1995) dalam Richardson (2007) memaparkan bahwa analisis wacana kritis mencakup analisis praktik sosial suatu teks atau sosial budaya dalam satu teks tempat aktivitas komunikatif tersebut berlangsung. Pada intinya, AWK melibatkan analisis tentang (a) bagaimana hubungan wacana (bahasa digunakan) dengan reproduksi hubungan sosial; (b) adanya hubungan kekuasaan yang tidak setara atau diskriminatif. Masyarakat dan formasi sosial, yaitu faktor-faktor ekonomi, politik, dan ideologis masyarakat yang melatarbelakangi terciptanya, baik struktur dan bentuk karya penulis maupun penutur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial dan pada pemberian suara pada perasaan dan persepsi dari partisipan di bawah studi (Emzir, 2012). Sementara itu, Moleong (2012) menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian untuk memahami fenomena tentang perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang dapat diamati (Moleong, 2012).

Data penelitian ini berupa transkripsi debat Pilpres 2019 antara Jokowi-Amin dan Prabowo-Sandi (Riandi, 2019). Teknis pengambilan data dilakukan dengan mengumpulkan transkripsi debat tersebut, data diambil pada waktu debat pertama yg terdiri atas enam segmen tahun 2019 dan literatur yang berhubungan untuk mendapatkan informasi tambahan yang mendukung tujuan penelitian. Sementara itu, analisis data yang digunakan adalah analisis wacana kritis yang bersifat interpretatif. Djajasudarma (1993) menyatakan bahwa prinsip penafsiran dapat terjadi melalui penafsiran lokal (termasuk ruang dan waktu) dan prinsip analogi dalam menafsirkan pengertian (makna) yang terkandung dalam wacana. Interpretasi yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat terbuka, dinamis, dan dapat berubah. Analisis dan interpretasi tanda dan makna pesan verbal serta unsur wacana dalam debat politik ini mengikuti dasar-dasar teoretis analisis wacana kritis.

PEMBAHASAN

Dalam hal penggunaan bahasa seperti kata, para orator partai politik banyak menggunakan kata ganti (pronomina) yang meliputi kata ganti orang. Kata ganti orang pertama tunggal *saya*, jamak *kita*, dan kata ganti penunjuk yang digunakan dalam debat pilpres. Selain

itu, dibahas kalimat, kohesi dan koherensi, gaya bahasa, praktik wacana orasi, dimensi praktik sosial, hubungan kekuasaan, dan kekuatan semantik.

Kata Ganti

Kata ganti orang pertama tunggal banyak digunakan dalam pidato tokoh partai politik di Indonesia. Yang dimulai dari bagian awal pidato atau bagian pembukaan berisi salam dan sapaan kepada para hadirin, terutama dalam menyapa undangan atau hadirin dalam pidatonya, semua tokoh tersebut menggunakan kata ganti orang pertama tunggal *saya* yang mengacu pada pembicara itu sendiri. Penggunaan kata ganti orang pertama tunggal *saya* lebih mempunyai makna untuk menonjolkan diri serta menunjukkan eksistensi dirinya sebagai seorang yang mempunyai kapasitas untuk menyampaikan pidatonya di depan para hadirin. Selain pada bagian pembuka pidato, penggunaan kata ganti *saya* juga digunakan pada bagian isi pidato. Berikut contoh ujaran di dalam teks orasinya.

- (1) *Itu saya kira strategi utama kita. Kita yakin dengan lembaga-lembaga yang bersih, yang kuat, kita bisa menegakkan kepastian hukum.* (Orasi 1 Prabowo, hlm. 3, baris 14)
- (2) *Dalam kunjungan ke 1000 titik lokasi, bertemu masyarakat. Saya menemukan hal-hal yang sangat membuat kita miris, bahwa ada kisah Pak Najib, seorang nelayan di pantai Pasir Putih Cilamaya di Karawang. Beliau mengambil pasir untuk penanam mangrove di hutan bakau. Beliau dipersekusi, dikriminalisasi.* (Orasi 2 Sandi, hlm. 5, baris 15)
- (3) *Tadi saya sebut banyak terorisme yang merupakan penyusupan dari luar, yang terus ke dalam negeri, menurut pendapat saya adalah akibat rasa ketidakadilan.* (Orasi 3 Prabowo, hlm. 4, baris 28)
- (4) *Tadi saya melihat dalam struktur pengurusan partai yang bapak pimpin jabatan-jabatan strategis, seperti Ketua Umum, Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Penasihat, Ketua Dewan, Ketua Harian, Wakil Ketua Harian, Sekjen Bendahara semuanya laki-laki.* (Orasi 4 Jokowi, hlm. 1, baris 12)
- (5) *Saya tidak punya beban-beban masa lalu, sehingga enak dalam memberikan perintah-perintah, tidak ada kepentingan-kepentingan pejabat yang kami angkat.* (Orasi 5 Jokowi, hlm. 1, baris 8)
- (6) *Ya. Saya kira yang penting membangun budaya masyarakat untuk memberikan penghormatan dan kepada kelompok disabilitas menyamakan perlakuannya baik disabilitas maupun nondisabilitas.* (Orasi 2 Amin, hlm. 8, baris 2)

Keenam ujaran tersebut mengandung kata ganti orang pertama tunggal *saya* di dalam kalimat pernyataan dan kalimat ajakan. Kata ganti *saya* tersebut digunakan oleh Jokowi--Amin dan Prabowo-Sandi dalam menyampaikan penegasan, keadilan, kesetaraan, dan apresiasi atau penghargaan kepada hadirin atau publik. Dengan menggunakan kata *saya*, bukan kata ganti yang lain, menunjukkan bahwa yang sedang menyampaikan pidato lebih menonjolkan dirinya serta menunjukkan kepribadinya sendiri dan penekanan sebagai pribadi ketika menyampaikan apresiasi yang ditujukan kepada orang lain.

Dalam *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia (TBB)* Alwi dkk. (2017) menyebut kata ganti orang pertama jamak dengan istilah pronominal persona, yaitu kata ganti yang mengacu pada orang. Pronomina dapat mengacu pada diri sendiri (pronominal persona pertama), mengacu pada orang yang diajak berbicara (pronominal persona kedua). Kata *kita* sering digunakan oleh orator ketika berpidato.

Kata ganti orang pertama jamak *kita* tersebut digunakan pada bagian pembuka pidato dan isi pidato. Kata ganti orang pertama jamak *kita* menunjukkan bahwa pembicara juga melibatkan pendengar atau hadirin yang ada di hadapannya. Hal itu untuk menunjukkan bahwa antara pembicara yang menyampaikan pidato dan yang mendengarkan merupakan satu komunitas yang sama sehingga seakan-akan mempunyai persamaan misi dan visi dalam praktik kepartaiannya. Contoh berikut terdapat penggunaan kata ganti jamak *kita*.

- (1) *Dan untuk menjamin hak-hak tersebut negara harus didukung oleh sistem hukum yang adil dan penegakan supremasi hukum yang baik, melalui reformasi kelembagaan, dan penguatan*

- sistem manajemen hukum yang baik dan budaya taat hukum yang harus terus **kita** perbaiki....* (Orasi 1 Jokowi, hlm. 2, baris 13).
- (2) *Ini sulit, ini pekerjaan besar tapi harus **kita** lakukan supaya ada kepastian hukum supaya semuanya tahu sistem hukum di Indonesia dan hukum itu bekerja untuk semuanya.* (Orasi 2 Prabowo, hlm. 1, baris 37).
 - (3) *Ya negara **kita** ini sudah banyak dijadikan contoh oleh negara-negara lain dalam menangani terorisme.* (Orasi 3 Jokowi, hlm. 4, baris 12).
 - (4) *Ya seperti **kita** ketahui, banyak hukum yang masih tumpang tindih dan salah satu dari pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya di masyarakat, Bagaimana lagi Bapak sudah empat tahun bekerja untuk meyakinkan masyarakat bahwa tumpang tindih hukum dan lahirnya benturan-benturan kepentingan baru seperti penunjukkan-penunjukkan aparat hukum yang berafiliasi terhadap partai politik?* (Orasi 4 Sandi, hlm.2, baris 31)
 - (5) *Kalau **kita** sekarang cek di kejaksaan, boleh **kita** bandingkan, berapa orang sekarang yang sudah menunggu masuk KPK atau masuk penjara, **kita** bisa cek, janganlah **kita** saling menuduh soal partai **kita** masing-masing.* (Orasi 5 Prabowo, hlm. 2, baris 22--25)
 - (6) *Kekayaan **kita** mengalir keluar negeri ini bukan "salah siapa saja?" Ini salah kita bersama, sebagai bangsa. Dan ini kesalahan elite politik yang membiarkan ini sudah puluhan tahun.* (Orasi 6 Prabowo, hlm. 1, baris 30)

Penggunaan kata **kita** dari penggalan pidato tersebut sangat jelas mengacu pada pembicara/yang sedang berpidato dengan melibatkan seluruh pendengar/hadirin. Penggalan orasi tersebut merupakan kalimat pernyataan dan ajakan atau seruan. Kata ganti orang pertama jamak **kita** menjadi rujukan bahwa tidak hanya pembicara yang seharusnya melakukan segala sesuatu untuk partai, bangsa, dan negara. Namun, semua komunitas yang ada (terutama dalam ruang orasi) harus juga melakukan semua hal yang diamanatkan. Dalam *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia* (Alwi dkk., 2017) kata *kita* merupakan pronomina persona jamak inklusif, yaitu pembicara melibatkan mitra wicara dalam berbicara (berorasi). Dengan demikian, kedudukan antara pembicara dan pendengar di sini terasa sejajar atau setara.

Alwi dkk. (2017) menyebutkan bahwa pronominal penunjuk berfungsi sebagai kata ganti penunjuk. Kata ganti penunjuk ialah segala kata yang menunjukkan letak suatu benda atau yang dibendakan. Pemakaian kata ganti penunjuk bisa berfungsi untuk menghindari pengulangan hal-hal yang telah disampaikan agar tidak terjadi kebosanan. Namun, hal itu menuntut pendengar/hadirin atau penerima wacana untuk mencermati apa sebenarnya yang menjadi acuan kata ganti penunjuk tersebut, seperti tampak pada ujaran berikut.

- (1) *Memang kita masih memiliki beban **pelanggaran HAM** berat masa lalu, tidak mudah **menyelesaikannya**.* (Orasi 1 Jokowi, hlm. 2, baris 8).
- (2) *Tetapi pemenuhan **hak ekonomi, hak sosial, dan budaya** menjadi pilihan kami untuk memajukan Indonesia. Seperti akses terhadap lahan, akses terhadap pendidikan, akses terhadap pelayanan kesehatan, akses permodalan, dan hak atas pembangunan merupakan cara pemenuhan Hak Asasi Manusia yang paling dasar.... Dan untuk **menjamin hak-hak tersebut** negara harus didukung oleh sistem hukum yang adil dan penegakan supremasi hukum yang baik, melalui reformasi kelembagaan, dan penguatan sistem manajemen hukum yang baik dan budaya taat hukum yang harus terus kita perbaiki* (Orasi 1 Jokowi, hlm. 2, baris 4)
- (3) *Prabowo-Sandi berkomitmen, kita akan memastikan **putra-putri terbaik bangsa yang difabel, hidup untuk memenuhi potensinya**.* (Orasi 2 Sandi, hlm. 7, baris 22)
- (4) *Untuk itu, Prabowo-Sandi, manakala kita yang memimpin pemerintahan, kita akan benar-benar investasi besar-besaran dalam pendidikan, dalam kesehatan. Untuk membantu rakyat yang paling bawah, rakyat paling miskin. Kita akan bantu **pesantren-pesantren, madrasah-madrasah, guru-guru** di mana-mana harus kita perbaiki **kapasitasnya, kualitas hidupnya**.* (Orasi 3 Prabowo, hlm. 4, baris 33)
- (5) *Program kami ke depan adalah melanjutkan reformasi di bidang hokum secara total, salah satunya adalah **penataan regulasi. Penataan regulasi itu** menghilangkan yang tumpang tindih dan membuat regulasi peraturan yang berkualitas yang menguntungkan rakyat dan akan memberikan peluang terhadap investasi dan pengembang dan UKM, saya kira itu.* (Orasi 4 Amin, hlm. 3, baris 22)
- (6) *Inilah yang kita lakukan yaitu **memperbaiki sistem sehingga peluang untuk terjadinya korupsi tidak ada, ada transparansi di situ, ada keterbukaan di situ, ada manajemen***

pengawasan yang ketat, manajemen control kalau bapak memiliki bukti-bukti kuat, silakan dilaporkan. (Orasi 5 Prabowo, hlm. 4, baris 17)

Paparan tersebut menunjukkan bahwa kata *tersebut, itu, di situ*, dan sufiks *-nya* merujuk pada hal-hal yang telah disampaikan sebelumnya oleh orator. Dengan demikian, sangat jelas bahwa pembicara telah mengutarakan segala hal terkait hak-hak kepada hadirin sebelumnya. Tentu hal ini menuntut pendengar juga mencermati hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya tersebut. Pembicara atau orator bisa jadi menganggap bahwa semua hadirin mendengarkan dengan baik semua paparan yang disampaikan.

Sementara itu, penggunaan kalimat, baik aktif transitif maupun aktif intransitif dapat digunakan untuk menggambarkan proses aktivitas pembicara atau orator yang menonjol di dalam teks narasi pidatonya. Kalimat-kalimat yang diucapkannya tersebut dapat mempunyai dampak yang positif yang dapat mempengaruhi pendengar. Dalam hal ini bagaimana signifikansi kalimatnya terhadap pendengar atau audiensi. Bentuk kalimat dalam pidato politik tokoh-tokoh partai terdapat dalam penggalan berikut.

- (1) *Harusnya ini sudah selesai setelah peristiwa itu terjadi. Tapi **kami** tetap **berkomitmen** untuk menyelesaikan masalah HAM ini.* (Orasi 1 Jokowi, hlm. 2, baris 12)
- (2) *Penegakan hukum yang tegas merupakan bagian dari upaya pemberantasan korupsi, yang terus **kita lakukan** melalui perbaikan sistem pemerintahan dan bekerja sama menguatkan KPK serta mendorong sinergi antara KPK dengan Kejaksaan dan Kepolisian.* (Orasi 1 Jokowi, hlm. 2, baris 19)
- (3) *Dan terakhir, **kita** tetap harus **waspada** terhadap ancaman terorisme. Pemerintah terus bekerja keras, pendekatan penegakan hukum yang tegas, dan pendekatan yang persuasif lewat pembinaan agama, ekonomi, dan sosial.* (Orasi 1 Jokowi, hlm. 2, baris: 23)
- (4) ***Kami** akan **memberdayakan** badan pembinaan hukum nasional.* (Orasi 2 Prabowo, hlm. 1, baris: 33)
- (5) ***Kami** akan **melibatkan** para ahli, baik dari universitas di pusat maupun di daerah, karena banak sekali produk-produk hukum ini juga diterbitkan oleh pemerintah daerah maupun DPRD.* (Orasi 2 Sandi, hlm. 2, baris: 1)
- (6) ***Kami** ingin **menyelesaikan** akar masalah karena itu.* (Orasi 6 Prabowo, hlm. 1, baris: 27)

Penggunaan kalimat aktif intransitif dengan subjek pelaku *kami* (pada kalimat 1) dan pelaku *kita* (pada kalimat 2 dan 3) yang diikuti predikat *berkomitmen* (pada kalimat 1), *lakukan* (pada kalimat 2), dan *waspada* (pada kalimat 3) menyatakan bahwa pendengar dan pembicara bersama-sama melakukan dan berada dalam suatu kondisi pemahaman wawasan tertentu. Penggunaan bentuk kalimat aktif pada pidato yang diucapkan oleh Jokowi tersebut untuk menekankan pelakunya, dalam hal ini *kita* meliputi pembicara dan pendengar. Secara bersama-sama semua unsur yang ada dalam komunitas tersebut melakukan hal aktif bersama-sama. Penggunaan kalimat aktif transitif dengan subjek pelaku *kami* (pada kalimat 4, 5, dan 6) yang diikuti predikat *memberdayakan*, *melibatkan*, dan *menyelesaikan* menyatakan bahwa pendengar tidak bersama-sama ikut. Pronomina persona pertama jamak *kami bersifat eksklusif* yang berarti pronominal itu mencakupi pembicara dan orang lain di luar orang yang diajak berbicara.

Kalimat

Berikut ini adalah ujaran yang dihasilkan oleh para orator di dalam kalimat-kalimat ketika berorasi.

- (1) *Karena itu kami dalam menghadapi masalah hukum, masalah korupsi, masalah HAM, dan masalah terorisme, kami ingin **menyelesaikan** dari muara masalah.* (Orasi 1 Prabowo, hlm. 3, baris 3)
- (2) *Kami **berbeda** dengan Pak Prabowo dan Pak Sandi, penting sekali harmonisasi regulasi kita.* (Orasi 2 Jokowi, hlm. 2, baris 23).
- (3) *Kita harus bisa **mendeteksi** sebelum terjadi terorisme.* (Orasi 3 Prabowo, hlm. 5, baris 26).
- (4) *Iya, beliau **bertanggung jawab** untuk ideologi.* (Orasi 4 Prabowo, hlm 1, baris 25)
- (5) *Pertama, saya akan **mulai** dari saya, Pak Prabowo.* (Orasi 5 Jokowi, hlm. 1, baris 12).
- (6) *Kami **bertekad** untuk menghentikan kebocoran.* (Orasi 6 Prabowo, hlm 1, baris 29)

Paparan kalimat pertama yang diujarkan oleh pihak Prabowo juga merupakan kalimat aktif transitif. Kalimat yang diujarkan tersebut menggambarkan keadaan pelaku yang menonjol dan aktif dalam menghadapi masalah hukum, korupsi, dan HAM. Contoh kalimat (2—6) termasuk kalimat aktif intransitif. Verba pengisi predikat kalimat itu ialah verba aktif. Kalimat aktif yang tidak berobjek ditandai oleh verba berawalan *meN-*, seperti *mendeteksi*, *ber-*, seperti *berbeda*, *bertanggung jawab*, dan *bertekad*, dan tidak berawalan, seperti *mulai*.

Kohesi dan Koherensi

Pilihan kosakata yang tepat di dalam narasi orator harus merupakan satu kesatuan yang utuh dalam wacana. Wacana yang baik umumnya memiliki kohesi dan koherensi di dalamnya. Kohesi adalah keterikatan antar unsur dalam struktur sintaksis yang ditandai konjungsi, pengulangan, penulihan, dan pelesapan. Koherensi adalah kalimat yang satu dengan kalimat lain memiliki pertautan dalam satu paragraf. Pengertian yang satu menyambung dengan pengertian lain. Dalam hal ini, suatu wacana yang mempunyai kohesi dan koherensi perlu adanya analisis wacana agar kepaduan bentuk dan maknanya dapat terbentuk (Almanar, 2000: 13).

Pada orasi ini koherensi dicapai dengan penggunaan berbagai macam kosakata, seperti konjungsi, pronominal, dan istilah kata. Pada segmen ke-1 orasi pidato politik, leksikal atau kosakata pada bagian awal sering digunakan kata, frasa, atau ungkapan idiomatis yang mengacu pada istilah-istilah yang berhubungan dengan keagamaan, misalnya *bismillaahirohmaanirohiim*, *assalamu 'alaikum wr. wb.*, *alhamdulillah*, *insyaallah*, *Allah SWT*, Tuhan yang Maha Kuasa, *shaloom*, *om swastiastu*, dan *wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh*.

Ketika membuka pidatonya, baik Jokowi maupun Prabowo mengawali orasinya dengan mengucapkan kata salam, baik salam yang merujuk pada istilah atau kata-kata yang dipakai dalam agama Islam *Assalamu 'alaikum*, salam dalam agama Hindu *Om Swastiastu*, maupun dalam Nasrani *shaloom*. Ada yang mengawali dengan semua salam dari berbagai agama karena kemungkinan besar pembicara atau yang menyampaikan pidato sudah paham benar bahwa yang hadir berasal dari berbagai golongan yang berbeda agamanya, tetapi menyatu dalam komunitas yang sama.

Gaya Bahasa

Pemakaian gaya bahasa merupakan cara untuk mengungkapkan ide atau pendapat lewat wacana verbal atau berorasi. Oleh karena itu, gaya bahasa sangat terkait dengan aspek kebahasaan, mulai dari pilihan kata, pembentukan kata, pembentukan kalimat, dan penataan kalimat dalam suatu wacana. Lewat penggunaan gaya bahasa tertentu penutur atau orator ingin memberikan tekanan tertentu atau menonjolkan makna atau maksud atas isi wacana yang disampaikannya agar pendengar dapat memahaminya dengan efektif. Wacana pidato yang diungkapkan para orator capres dan wacapres juga mengandung penggunaan gaya bahasa tertentu. Berdasarkan data yang terhimpun, wacana pidato para orator tersebut menggunakan empat gaya bahasa, yaitu (a) hiperbola, (b) metafora, (c) personifikasi, dan (d) repetisi. Gaya bahasa hiperbola adalah suatu pernyataan yang berlebihan dengan membesar-besarkan sesuatu hal; metafora adalah gaya bahasa yang tidak menyatakan sesuatu perbandingan secara eksplisit tetapi sekadar memberikan sugesti adanya suatu perbandingan; personifikasi adalah gaya bahasa yang menggambarkan benda-benda mati seolah-olah memiliki sifat-sifat kemanusiaan; dan repetisi adalah perulangan kata-kata yang penting untuk memberi tekanan dalam sebuah konteks yang sesuai (Keraf, 2007).

Gaya hiperbola dipakai Jokowi ketika ingin menonjolkan bagian tertentu dalam wacana yang diungkapkan. Ungkapan gaya bahasa yang dimaksud seperti berikut ini.

- (1) *Dan untuk menjamin hak-hak tersebut negara harus didukung oleh sistem hukum yang adil dan penegakan **supremasi** hukum yang baik, melalui reformasi kelembagaan.* (Orasi 1 Jokowi, hlm 2, baris14)
- (2) *Dengan online single submission ini yang dulunya kalau orang ingin mencari izin sampai bertahun-tahun, **bukan berbulan-bulan, bertahun-tahun**, izin sekarang bapak sebagai pengusaha, coba ke online single submission.* (Orasi 5 Jokowi, hlm 1, baris 19)
- (3) *Kita tahu korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, bahkan Pak Prabowo pernah mengatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah **stadium empat*** (Orasi 5 Prabowo, hlm 3, baris 33)

Contoh di atas mendeskripsikan ada kata yang ingin ditekankan atau ditonjolkan. Kata yang ditonjolkan tersebut adalah kata **supremasi**, **bukan berbulan-bulan**, **bertahun-tahun**, dan **stadium empat**. Penonjolan bagian tertentu dalam wacana yang diungkapkan dengan cara memilih kata tertentu yang dianggap mempunyai nuansa 'lebih' dari pada kenyataan yang ada. Kata **supremasi**, **bukan berbulan-bulan**, **bertahun-tahun**, dan **stadium empat** mempunyai makna dan nuansa lebih yang ingin ditonjolkan oleh orator. Dengan demikian, maksud penggunaan gaya bahasa hiperbola ini agar pendengar atau undangan peserta lebih menghayati yang disampaikan oleh orator dalam wacana politiknya.

Gaya bahasa metafora disebut sebagai gaya bahasa perbandingan dan merupakan bahasa kiasan. Gaya metafora dipakai Jokowi ketika ingin menonjolkan bagian tertentu dalam wacana yang diungkapkan. Ungkapan gaya bahasa metafora yang dimaksud seperti berikut ini.

- (1) *Pemerintah terus **bekerja keras**, pendekatan penegakan hukum yang tegas dan pendekatan yang persuasif lewat pembinaan agama, ekonomi, dan sosial.* (Orasi 1 Jokowi, hlm. 2, baris 23)
- (2) *Hukum yang tidak **tebang pilih**, tidak **tajam ke bawah**, tapi **tumpul ke atas**.* (Orasi 1 Sandi, hlm.3, baris19)
- (3) *Negeri yang **kaya raya** ini, negeri yang luar biasa **Gemah Ripah Loh Jinawi** ini masih menyisakan banyak masalah lapangan kerja.* (Orasi 2 Sandi, hlm. 2, baris11)
- (4) *Saya jamin Partai Gerinda akan melawan korupsi sampai **ke akar-akarnya** kalau ada anggota Partai Gerinda ada yang korupsi maka saya yang akan masukin ke penjara sendiri.* (Orasi 5 Prabowo, hlm. 2, baris 24)

Frasa *bekerja keras* mengandung makna kiasan. Kata *keras* tersebut mengandung makna perbandingan *seperti batu*. Penonjolan frasa *bekerja keras* dalam wacana diungkapkan oleh Jokowi karena dianggap mempunyai nuansa makna tertentu, yaitu 'gigih dan sungguh-sungguh'. Orator kedua di kubu Sandi menggunakan pilihan kata *tebang pilih*, *tajam ke bawah*, dan *tumpul ke atas*. Ketiga kelompok kata tersebut mengandung makna kiasan yang merupakan gaya bahasa metafora. Ketiga frasa tersebut digunakan sebagai perbandingan yang merujuk 'semua warga masyarakat'; 'pejabat atau orang yang berkuasa'; dan 'masyarakat umum/rakyat'. Selain itu, Sandi juga menggunakan pilihan kata *kaya raya* 'kaya sekali' dan *gemah ripah loh jinawi* 'kekayaan alam yang berlimpah' yang merupakan ungkapan berbahasa Jawa. Kedua frasa tersebut mengandung makna kiasan yang merupakan gaya bahasa metafora. Gaya bahasa tersebut digunakan untuk merujuk 'banyak masalah dalam hal lapangan kerja'. Penonjolan frasa *ke akar-akarnya* dalam wacana diungkapkan oleh Prabowo karena dianggap mempunyai nuansa makna tertentu, yaitu 'yang menjadi sebab-sebabnya'. Maksud penggunaan gaya bahasa metafora ini agar pendengar atau undangan peserta lebih dapat menghayati apa yang disampaikan oleh orator di dalam wacana politiknya.

Gaya bahasa personifikasi disebut sebagai gaya bahasa penginsanan dan merupakan bahasa kiasan. Gaya bahasa personifikasi dipakai Jokowi ketika ingin menonjolkan bagian tertentu dalam wacana yang diungkapkan. Ungkapan gaya bahasa penginsanan yang dimaksud tampak seperti berikut ini.

- (1) *Dan juga lembaga-lembaga **pemerintahan harus kuat**, terutama lembaga-lembaga penegak hukum.* (Orasi 1 Prabowo, hlm:3, baris:1)

Frasa *pemerintah harus kuat* mengandung makna kiasan personifikasi. Penonjolan kata *pemerintah* dianggap sebagai insan/manusia yang kuat. Dalam orasinya penggunaan gaya bahasa tersebut dianggap mempunyai nilai lebih yang dapat menarik perhatian pendengar atau hadirin.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa maksud penggunaan gaya personifikasi tersebut agar pendengar atau undangan peserta dapat lebih memahami apa yang disampaikan oleh orator.

Gaya bahasa repetisi merupakan perulangan bunyi, suku kata, kata, atau bagian kalimat yang dianggap penting untuk memberi tekanan dalam sebuah konteks yang sesuai. Dalam orasi timbul bermacam-macam variasi repetisi. Ungkapan gaya bahasa repetisi tampak pada kalimat berikut.

- (1) *Jangan **hukum** ini dipakai untuk memukul lawan tapi melindungi kawan. Kita pastikan **hukum** ini tegak lurus, supremasi HAM harus kita pastikan hadir di Indonesia.* (Orasi 2 Sandi, hlm. 5, baris 24)
- (2) *Dan **aset terbesar bangsa ini** adalah persaudaraan, **aset terbesar bangsa ini** adalah persatuan, **aset terbesar bangsa ini** terukur.* (Orasi 2 Jokowi, hlm. 5, baris 33)
- (3) *Saya dengarkan, **ada** yang mau impor **ada** yang mau tidak impor tetapi kalau sudah diputuskan bahwa kalau menteri sama semuanya.* (Orasi 5 Prabowo, hlm. 2, baris 2)
- (4) *Dengan **online single submission** ini yang dulunya kalau orang ingin mencari izin sampai bertahun-tahun, bukan berbulan-bulan, bertahun-tahun, izin sekarang bapak sebagai pengusaha, coba ke **online single submission**.* (Orasi 5 Jokowi, hlm. 1, baris 15)

Dalam orasi nilai repetisi dianggap tinggi sehingga para orator menciptakan bermacam-macam repetisi berdasarkan tempat kata yang diulang dalam frasa, klausa, dan kalimat. Kata *hukum* merupakan sebuah kata yang diulang pada kalimat berikutnya yang dianggap penting untuk memberi tekanan dalam sebuah konteks yang sesuai agar para hadirin dapat memahami yang disampaikan oleh orator. Demikian juga, terdapat pada repetisi *aset terbesar bangsa ini*, *ada*, dan *online single submission*.

Praktik Wacana Orasi

Dalam dimensi praktik wacana, analisis dilakukan terhadap pemrosesan wacana yang meliputi aspek penghasilan (produksi), penyebaran, dan penggunaan wacana. Untuk pidato yang diujarkan oleh Jokowi dan Prabowo tersebut, tidak diketahui siapa yang membuat naskah teks pidato. Bisa jadi yang menyusun teks orasi adalah para oratornya sendiri (Jokowi dan Prabowo). Namun, dapat dipastikan bahwa dalam menyampaikan pidatonya para orator berperan aktif.

Selanjutnya, di dalam penyebaran wacana akan dianalisis hubungan antarteks pidato. Dengan kegiatan itu dapat diduga ada penafsiran akan teks-teks pidato, seperti contoh berikut.

- (1) *Kami menawarkan optimisme dan masa depan Indonesia yang berkeadilan. Saya berkeyakinan, semakin maju, semakin demokratis dan modern sebuah negara, maka penegakan hukum dan HAM akan semakin baik. Bukan hanya hak sipil dan politik yang penting. Tetapi pemenuhan hak ekonomi, hak sosial dan budaya menjadi pilihan kami untuk memajukan Indonesia.* (Orasi 1 Jokowi, hlm. 1, baris 34)
- (2) *Tetapi pemenuhan hak ekonomi, hak sosial dan budaya menjadi pilihan kami untuk memajukan Indonesia.* (Orasi 1 Jokowi, hlm 2, baris 4)
- (3) *Seperti akses terhadap lahan, akses terhadap pendidikan, akses terhadap pelayanan kesehatan, akses permodalan, dan hak atas pembangunan merupakan cara pemenuhan Hak Asasi Manusia yang paling dasar.* (Orasi 1 Jokowi, hlm 2, baris 6)
- (4) *Tapi kami tetap berkomitmen untuk menyelesaikan masalah HAM ini... harus didukung oleh sistem hukum yang adil dan penegakan supremasi hukum yang baik,* (Orasi 1 Jokowi, hlm 2, baris 12)

Penggalan pidato tersebut memperlihatkan penggunaan wacana. Isu yang dilontarkan adalah penegakan hukum yang tegas, tanpa pandang bulu yang juga merupakan bagian dari upaya pemberantasan korupsi. Dengan keadaan itu, akan terwujud pemenuhan ekonomi, sosial, dan budaya untuk memajukan Indonesia. Kemudian, isu yang kedua adalah ancaman terorisme. Untuk mengatasi itu, pemerintah harus berkerja keras melalui pembinaan agama, ekonomi, dan sosial.

Penggalan pidato selanjutnya berkaitan erat dengan usaha partai dengan program HAM seperti tampak pada data berikut.

- (1) *Visi misi kami, kami beri nama Indonesia Menang. Indonesia menang karena sekarang kita rasakan indikator-indikator menunjukkan bahwa kita berada dalam kondisi yang tidak begitu menguntungkan.* (Orasi 1 Prabowo, hlm. 2, baris 31)
- (2) *Lembaga-lembaga pemerintahan harus kuat, terutama lembaga-lembaga penegak hukum.* (Orasi 1 Prabowo, hlm. 3, baris 1)
- (3) *Masalah korupsi, masalah HAM, dan masalah terorisme, kami ingin menyelesaikan dari muara masalah.* (Orasi 1 Prabowo, hlm. 3, baris 4)
- (4) *... punya wewenang mengambil keputusan, sehingga dia tidak bisa dikorupsi. Dia tidak bisa tergoda oleh godaan-godaan koruptor atau yang akan menyokong dan akan mempengaruhi dia.* (Orasi 1 Prabowo, hlm. 3, baris 7)

Paparan orasi itu merupakan isu yang dilontarkan oleh Prabowo. Penggalan orasi tersebut tidak jauh berbeda dengan Jokowi. Prabowo juga menekankan isu tentang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Dalam orasinya, Prabowo mengatakan akan memulai/menangani masalah yang akan diawali dari muara masalah, yaitu dengan menjamin kualitas hidup semua petugas dengan menguasai sumber-sumber ekonomi bangsa Indonesia. Menurut pelaku orasi, dengan kondisi tersebut, tidak akan terjadi masalah korupsi dan pelanggaran ham.

Kegiatan orasi yang dilakukan oleh kubu Jokowi dan Prabowo tersebut telah diliput oleh stasiun televisi. Sementara itu, penyampaian pidato tersebut telah menjangkau hampir seluruh wilayah nusantara. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ujaran pidato kedua tokoh tersebut telah didengar oleh masyarakat luas Indonesia, terutama masyarakat beserta partai-partai yang didukungnya. Melalui sarana media elektronik, baik televisi maupun radio, penyebaran penggunaan wacana/pidato oleh kedua tokoh politik tersebut diperkirakan dapat dimanfaatkan oleh partai-partai politik lainnya untuk menentukan kebijakan partai dalam membangun bangsa Indonesia.

Dari paparan tersebut dapat diketahui bahwa sebuah partai harus bekerja untuk semua golongan, tidak hanya untuk golongan partainya saja. Untuk penyebarannya secara utuh, pidato-pidato tersebut secara keseluruhan disampaikan di hadapan para pengurus, kader, dan simpatisan partai masing-masing serta tamu undangan lain yang hadir pada acara tersebut.

Dimensi Praktik Sosial

Dari berbagai macam narasi teks pidato, tampak dimensi praktik sosial para tokoh politik. Dimensi praktik sosial itu memaparkan proses dan praktik sosial dengan berdasarkan hubungan dimensi tekstual dan dimensi praktik wacana atau berdasarkan hubungan analisis dimensi teks dan dimensi wacana seperti yang telah dilakukan sebelumnya. Jika narasi pidato tersebut dikaitkan dengan pembangunan masyarakat yang berkehidupan berbangsa dan bernegara dengan baik, tiap-tiap unsur partai harus bekerja bersama untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Selain itu, secara lebih luas orator mengajak seluruh hadirin atau peserta undangan untuk bekerja sama dalam mewujudkan kehidupan bernegara yang lebih baik.

Tokoh orator Jokowi mengungkapkan keyakinannya bahwa Indonesia akan semakin maju seiring dengan semakin demokratis dan modern. Dengan partai yang didukungnya, Jokowi juga mengungkapkan penegakan hukum dan HAM yang juga akan semakin baik. Menurut Jokowi, semua kegiatan itu akan diawali dengan pemenuhan hak ekonomi yang menjadi prioritas. Secara umum seluruh proses dan praktik sosial yang dijalankan oleh orator tersebut dinyatakan dan dikembangkan dalam suatu struktur teks pidato yang terdiri atas pembuka teks, isi teks, dan penutup teks.

Selanjutnya, pihak kubu Prabowo lebih mengungkapkan masalah penegakan hukum, korupsi, dan terorisme. Di dalam orasinya, Prabowo mengungkapkan bahwa untuk mengatasi masalah tersebut haruslah ditangani dari muara atau akar masalahnya. Jadi, dengan partai yang

diusungnya Prabowo akan melakukan tindakan dengan menjamin kualitas hidup semua petugas yang mempunyai wewenang pengambil keputusan. Dengan aksi yang akan dilakukan itu, Prabowo mempunyai harapan bahwa tidak akan terjadi aksi korupsi lagi. Dimensi praktik sosial yang dilakukan Prabowo tersebut dinyatakan dan dikembangkan dalam suatu struktur teks pidato secara keseluruhan. Dari pidato kedua kelompok tokoh politik yang berbeda-beda tersebut tampak terlihat bahwa mereka semua ingin membangun Indonesia dan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hubungan Kekuasaan

Hubungan kekuasaan yang dibangun oleh tokoh partai-partai politik melalui pidato politiknya tidaklah selalu sama. Hubungan kekuasaan dalam pidato tersebut dibentuk melalui bahasa yang digunakan. Adakalanya tokoh partai politik mempunyai kuasa yang superior atas lainnya, inferior, atau bahkan sejajar dengan yang lain. Ungkapan itu tampak dari penggalan orasi berikut.

- (1) *Yang saya hormati Bapak Prabowo Subianto, dan Bapak Sandiaga Uno, kawan baik saya.* (Orasi 1 Jokowi, hlm. 1, baris 31).
- (2) *Yang saya hormati Bapak Kyai Haji Ma'ruf Amin.* (Orasi 1 Jokowi, hlm. 1, baris 32)
- (3) *Bapak Ibu yang saya hormati, visi kami adalah hidup bisa maju.* (Orasi 1 Jokowi, hlm. 3, baris 34)

Ketiga ungkapan tersebut adalah ujaran Jokowi pada saat membuka pidato dan menyapa hadirin, undangan, dan pendengarnya. Pembicara--dalam hal ini yang menyampaikan pidato, yaitu Jokowi--menggunakan ungkapan *yang saya hormati*. Ketika menggunakan ungkapan tersebut, maknanya jelas bahwa pembicara menjadi inferior jika dibandingkan dengan yang mendengar atau yang hadir. Dengan ungkapan tersebut, pembicara memosisikan keberadaan dirinya di bawah dan yang disapa (hadirin/undangan) berada di posisi atas. Mereka dihormati dan berada di posisi superior karena mereka berkenan hadir dan meluangkan waktu untuk mendengarkan pidato. Namun, bagi pembicara (Jokowi) ungkapan idiomatis *yang saya hormati* juga bisa dimaknai sebagai ungkapan kesantunan. Dalam budaya Jawa salah satu bentuk kesantunan itu ditandai dengan cara meninggikan orang lain dan merendahkan diri sendiri sehingga mitra bicara merasa dihormati (Sasangka, 2019). Karena merasa dihormati, muka (*face*) mitra bicara merasa nyaman, tidak terancam, dan tidak dibuat malu oleh pembicara (orator).

Penggalan orasi berikut ini merupakan contoh yang memperlihatkan hubungan kekuasaan yang dibangun orator Prabowo—Sandi.

- (1) *Hadirin hadirat yang saya hormati,* (Orasi 1 Prabowo, hlm.2, baris 9).
- (2) *Calon nomor satu yang saya hormati dan saya banggakan, serta saudara sekalian* (Orasi 1 Prabowo, hlm.2, baris 28).
- (3) *Pak Presiden yang saya hormati, saya tidak menuduh. Yang kami sampaikan adalah cerita yang kami tampung dalam kunjungan.* (Orasi 2 Sandi, hlm. 6, baris 5).

Ketiga contoh ungkapan tersebut merupakan ujaran Prabowo ketika mengawali pidatonya. Ungkapan yang digunakan Prabowo berupa kelompok kata *yang saya hormati*. Aksi yang dilakukan oleh Prabowo tersebut juga sama seperti Jokowi, yaitu mengandung makna *superior-inferior*.

Ketika menggunakan ungkapan tersebut, maknanya jelas bahwa Prabowo menjadi inferior jika dibandingkan dengan audien yang mendengar atau yang hadir. Dengan ungkapan-ungkapan tersebut, pembicara memosisikan dirinya di bawah dan yang disapa (hadirin/undangan) berada di posisi atas. Mereka yang dihormati berada pada posisi superior.

Kekuatan Semantik

Pada transkripsi Debat Calon Presiden Pilpres 2019 segmen empat (2019) ditemukan beberapa wacana yang memiliki kekuatan semantik dalam menarik suara pemilih, seperti tampak pada data berikut ini.

- (1) *Terima kasih, dalam visi misi Bapak menyebutkan bahwa setiap kebijakan akan perspektif gender dan pemberdayaan dan perempuan akan memprioritaskan pemberdayaan perempuan. Tapi saya melihat dalam struktur pengurusan partai yang bapak pimpin jabatan jabatan strategis seperti Ketua Umum, Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Penasehat, Ketua Dewan, Ketua Harian, Wakil Ketua Harian, Sekjen bendahara, semuanya laki-laki. (Orasi 4 Jokowi, hlm. 1, baris 9—15)*
- (2) *Iya beliau bertanggung jawab untuk ideologi. Kita juga punya beberapa Wakil Ketua Umum lainnya, kemudian kita punya sayap partai yang namanya perempuan Indonesia Raya dan kita punya susunan caleg, saya kira mungkin terbanyak dari seluruh partai, Pak. (Orasi 4 Prabowo, hlm. 1, baris 25--28)*
- (3) *Undang-Undang kalau tidak salah mewajibkan 30 persen, kita mungkin sudah mendekati 40 persen, walau mungkin tidak sampai 40 tapi sudah mendekati dan itu tekad kami. Jadi kita memang mengakui ini adalah suatu perjuangan, kita belum puas tapi kami membuka peluang sebesar besarnya untuk emak-emak perempuan untuk untuk bergerak dan sekarang pendukung kita yang paling keras adalah emak-emak di seluruh Indonesia, saya kira demikian. (Orasi 4 Prabowo, hlm. 1, baris 29--34)*
- (4) *Iya sebetulnya saya tidak harus menjawab lagi, karena Pak Prabowo mengakui, tetapi bahwa apa yang sudah diakui tadi kalau boleh bandingkan mohon maaf misalnya di kabinet saya. Saat saya membentuk kabinet, ada 9 menteri perempuan yang menempati tempat-tempat strategis. Misalnya Menlu itu adalah Menteri Luar Negeri pertama, kemudian Menteri BUMN, Menteri Keuangan, kemudian Menteri LHK, kemudian Menteri yang berani dan nekat Menteri Kelautan dan Perikanan. Dan saya juga pernah membentuk younger kapan saja KPK, terdiri dari 9 orang yang semua semuanya perempuan dan mereka bisa memilih komisioner yang. (Orasi 4 Jokowi, hlm. 2, baris 7—15)*
- (5) *Baik saya kira itu, tapi juga sekarang masyarakat juga menilai beberapa yang Bapak tadi banggakan, justru yang menunjukkan suatu kerugian kerugian besar bagi kepentingan bangsa dan rakyat. Jadi menurut saya, kita jangan permasalahan orang demi orang, ya kita masalahkan adalah kebijakan kebijakan yang dia hasilkan dan dia produk kan, jadi kalau dibilang masalah gender oke kita cari, kita bisa hitung jumlah tapi kalau kita bilang output kita bisa berlipat lagi, kita bisa berlipat lebih lama lagi, jangan hanya perempuan diangkat dan kita bangga, harus perempuan tapi juga cakap dan pro rakyat, dan tidak perempuan mengambil kebijakan kebijakan yang merugikan rakyat ini masalahnya, jadi saya tidak akan membanggakan hanya karena dia perempuan, kalau dia perempuan tapi dia tidak membela rakyat sendiri ya saya kira tidak perlu dibanggakan. (Orasi 4 Prabowo, hlm. 2, baris 16--27)*
- (6) *Bagaimana lagi Bapak sudah 4 tahun bekerja untuk meyakinkan masyarakat bahwa tumpang tindih hukum dan lahirnya benturan-benturan kepentingan baru seperti penunjukan-penunjukan aparat hukum yang berafiliasi terhadap partai politik? Bagaimana investasi bisa meningkat kalau ada kepastian hukum yang terus dipertanyakan, UKM sulit untuk berkembang, banyak sekali UKM yang menanyakan kepastian hukum, nah kami ingin menanyakan kepada Bapak bagaimana untuk memastikan dan ini terjadi seandainya Bapak mendapatkan amanah dari Allah subhaana Wata'ala untuk 5 tahun ke depan sementara bapak sudah 4 tahun menunjukkan ketidakberhasilan untuk kepastian hukum dan benturan kepentingan hadir di mana? (Orasi 4 Sandi, hlm. 3, baris 1--10)*
- (7) *Saya akan lakukan revisi-revisi Undang-Undang yang menghambat berkembangnya UKM-UKM kita. Kita akan revisi banyak sekali Undang-Undang yang tidak pro pada investasi, kita juga akan perbaiki aparat-aparat yang tidak memberikan pengayoman tidak memberikan perlindungan terhadap rakyat kita, karena menurut saya hukum adalah bagaimana negara ini bisa melindungi rakyatnya. Hukum harus bisa memberikan kepastian kepada investasi dan dunia. Usaha dan hukum juga tidak tebang pilih dan hukum betul-betul bisa memberikan rasa tenteram, rasa nyaman kepada seluruh rakyat Indonesia. Pak Kyai saya persilahkan untuk menambahkan. (Orasi 4 Jokowi, hlm. 3, baris 12—21)*
- (8) *Jadi yang kita permasalahan adalah bagaimana yang yang Bapak sebut tadi ya Pak Presiden Jokowi tadi sebut aparat-aparat yang tidak mengagumi ditutup. Sekarang*

masalah yang kita ingin tanya sebagaimana karena bapak sudah memimpin selama 4 tahun, jadi bagaimana apa yang-tunggu adalah sebetulnya apa yang bisa tak dilakukan segera sehingga tidak terjadi yang seperti yang kita kuatirkan semua itu? Sehingga terjadilah sekarang kesan bahwa penegakan hukum keadilan itu hanya untuk orang kuat, orang kaya, orang yang punya koneksi, yang tadi ditanya oleh Wakil Presiden saya Insya Allah mencolok ini. (Orasi 4 Prabowo, hlm. 3, baris 29--36)

- (9) *Aneh jadi ditanya adalah bagaimana tanggapan Bapak, ya kalau jabatan-jabatan penting itu diserahkan kepada Kader yang aktif dari partai-partai politik dan bukan seorang yang benar netral. (Orasi 4 Prabowo, hlm. 3--4, baris 1--3)*
- (10) *Saya kira kita tidak boleh mendiskriminasi bahwa sebuah jabatan itu harus diberikan kepada, tidak kepada orang partai atau tidak ada harus kepada seorang profesional. (Orasi 4 Jokowi, hlm. 4, baris 3--5)*
- (11) *Menurut saya, jabatan itu yang paling penting seperti tadi bisa sampaikan ada sebuah merit sistem, ada sebuah proses rekrutmen yang betul, proses rekrutmen yang transparan, proses recruitment yang mengacu pada kompetensi, kepada integritas, kepada kapasitas, banyak kok aparat hukum yang berasal dari partai yang dalam memimpin juga sangat baik dan legendaris. (Orasi 4 Jokowi, hlm. 4, baris 6--10)*

Penggalan artikel di atas merupakan wacana yang sering muncul dalam Debat Calon Presiden Pilpres 2018. Adapun klausa/frasa yang memiliki kekuatan semantis dalam meyakinkan pemilih di antaranya adalah sebagai berikut.

- (1) *Perspektif gender dan pemberdayaan dan perempuan akan memprioritaskan pemberdayaan perempuan. (Orasi 4 Jokowi, hlm. 1, baris 10)*
- (2) *Jadi kita memang mengakui ini adalah suatu perjuangan, kita belum puas tapi kami membuka peluang sebesar-besarnya untuk emak-emak. (Orasi 4 Prabowo, hlm. 1, baris 32--33)*
- (3) *Iya sebetulnya saya tidak harus menjawab lagi, karena Pak Prabowo mengakui, (Orasi 4 Jokowi, hlm. 2, baris 7--8)*
- (4) *Bagaimana lagi Bapak sudah 4 tahun bekerja untuk meyakinkan masyarakat (Orasi 4 Sandi, hlm. 3, baris 1)*
- (5) *Bagaimana investasi bisa meningkat kalau ada kepastian hukum yang terus dipertanyakan (Orasi 4 Sandi, hlm. 3, baris 4)*
- (6) *Saya akan lakukan revisi-revisi undang-undang yang menghambat berkembangnya UKM-UKM kita. (Orasi 4 Jokowi, hlm.3, baris 13)*
- (7) *Hukum harus bisa memberikan kepastian kepada investasi dan dunia (Orasi 4 Jokowi, hlm. 3, baris 18)*
- (8) *Sekarang masalah yang kita ingin tanya sebagaimana karena bapak sudah memimpin selama 4 tahun. (Orasi 4 Prabowo, hlm. 3, baris 31--32)*
- (9) *Aneh jadi ditanya adalah bagaimana tanggapan Bapak. (Orasi 4 Prabowo, hlm. 3, baris 37)*
- (10) *Saya kira kita tidak boleh mendiskriminasi (Orasi 4 Jokowi, hlm. 4, baris 3)*
- (11) *Ada sebuah merit sistem, ada sebuah proses rekrutmen yang betul dan yang paling penting proses rekrutmen yang betul.... (Orasi 4 Jokowi, hlm. 4, baris 6--7)*

Berdasarkan data di atas tampak muncul kata atau frasa *gender*, *caleg perempuan*, *aneh ketika ditanya*, *tidak harus menjawab*, dan *akan melakukan revisi* yang memperlihatkan bahwa kedua orator dalam debat tersebut sepakat mengangkat isu yang sama, yaitu (a) isu kesamaan gender, (b) kabinet kerja, (c) ketidakpercayaan pihak *incumbent* 'petahana' akan jumlah anggota legislatif wanita di partai lawan. Sementara itu, pihak penantang lebih memprioritaskan kualitas caleg perempuan daripada kuantitas. Namun, terdapat ketidaksesuaian jawaban dari pertanyaan yang diajukan pihak lawan. Meskipun begitu, pihak *incumbent* yakin bahwa kinerja kabinetnya akan terus meningkat walaupun menurut kubu lawan kata *akan* merupakan representasi dari ketidakpastian.

PENUTUP

Paparan analisis tersebut memperlihatkan bahwa teks pidato yang diproduksi/dihasilkan oleh tokoh partai politik telah memanfaatkan fitur linguistik, seperti struktur teks, kosakata, gaya bahasa atau majas, kalimat, kohesi dan koherensi, ketransitifan, dan kata ganti. Secara

tekstual, wacana dan sosial menunjukkan fitur semantik yang digunakan untuk melancarkan suatu proses sosial, yaitu pembentukan citra positif suatu partai dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Proses dan praktik sosial yang disalurkan oleh tokoh partai politik tersebut berkaitan erat dengan latar belakang sosial, politik, dan nilai-nilai budaya mereka secara khusus dan budaya Indonesia secara umum. Wacana verbal dalam debat Pilpres 2019 diekspresikan dalam bentuk rangkaian kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Kalimat-kalimat yang diungkapkan adalah kalimat yang berbentuk kalimat ajakan, kalimat seruan, kalimat harapan, kalimat janji, dan kalimat pernyataan. Wacana pidato yang diungkapkan oleh para orator tersebut juga mengandung pemakaian gaya bahasa, yaitu gaya bahasa hiperbola, metafora, personifikasi, dan repetisi. Temuan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah khazanah kepustakaan linguistik dan sebagai bahan perencanaan bahasa serta kebijakan Badan Bahasa dan instansi terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Adili, L. O. (2015). Analisis Wacana Dimensi Teks Model Van Dijk Pada Teks Berita Kritik Pemerintahan Jokowi. *Multilingual, Volume XIV, No.2, Desember 2015*, 216--242.
- Almanar, A. E. (2000). *Kohesi dalam Media Massa Cetak Bahasa*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Alwi, H. dkk. (2017). *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Damayanti, N. (2015). "Gaya Komunikasi Jokowi pada Debat Politik Pilpres 2014". *Wacana, Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi. Volume XIV, No. 2, Juni 2015*, 153—163. <https://doi.org/10.32509/wacana.v14i2.103>
- Djajasudarma, T. F. (1993). *Metode Linguistik: Ancangan Metode Penelitian dan Kajian*. (W. Nadeak, ed.). Bandung: PT Eresco.
- Emzir. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Eriyanto. (2001). *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LkiS.
- Fairclough, N. (1995). *Media Discourse*. London: Edward Arnold.
- Fairclough, N. (2003). *Critical Discourse Analysis*. Harlow: Longman.
- Keraf, G. (2007). *Diksi dan Gaya Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kridalaksana, H. (2001). *Kamus Linguistik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kusno, A. &. (2017). Analisis Wacana Kritis Cuitan Fahri Hamzah (FH) Terkait Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Ranah*, 6(2), 137—159, <https://doi.org/10.26499/rnh.v6i2.462>
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Riandi, O. (2019). *Transkrip Lengkap (6 segmen) Debat Pertama Capres-Cawapres RI tanggal 17 Januari 2019 dan Analisis Konten Jalannya debat Capres-Cawapres*. Jakarta: PT Bahasakita <http://www.bahasakita.co.id>.
- Richardson, E. (2007). Discourse & Society. *journals.sagepub.com.*, doi.org/10.1177/0957926507821997
- Sasangka, S. S. (2019). *Unggah-Ungguh Bahasa Jawa (Edisi revisi)*. Yogyakarta: Elmaterra Publishing.
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2017). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Van Dijk, T. A. (1999). Critical Discourse Analysis. *journal.sagepub.com.*, 352--371.
- Yulianti, A. I., & Firdaus, W. (2019). Ungkapan Keprihatinan dalam "Maklumat Akal Sehat"(Analisis Wacana Kritis terhadap Maklumat Rocky Gerung dkk). *Ranah: Jurnal Kajian Bahasa*, 8(1), 93-109. <https://doi.org/10.26499/rnh.v8i1.961>